



Judul : Integritas Pejabatnya Masih Jeblok - 127 Kepala Daerah Tersandung Korupsi
Tanggal : Selasa, 14 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Integritas Pejabatnya Masih Jeblok

127 Kepala Daerah Tersandung Korupsi

Pemerintah Daerah (Pemda) kudu bisa meningkatkan integritas dan transparansi jika ingin rakyatnya sejahtera dan daerahnya maju. Sebab, masalah itu selama ini menjadi salah satu hambatan utama realisasi otonomi daerah.

KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat, ada 127 kepala daerah menjadi terpidana kasus korupsi. Hal ini menjadi cermin masih rendahnya integritas dan transparansi.

"Isu transparansi dan integritas masih menjadi sorotan publik sejak 2004 hingga 2021," ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam rapat RUU (Rancangan Undang-undang) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Komisi XI DPR di Jakarta, kemarin.

Ani, sapaan Sri Mulyani menilai, hal tersebut menjadi salah satu faktor krusial yang menghambat pencapaian tujuan berne-

gara dalam era otonomi daerah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyoroti masih rendahnya daya saing dan kolaborasi daerah. Disebutkannya, lebih dari 60 persen daerah memiliki nilai indeks daya saing rendah dan sedang.

Kemudian, lanjut Ani, masalah pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Hal ini terlihat dari belanja birokrasi. Seperti belanja pegawai dan barang rata-rata masih mencapai 59 persen, dari total anggaran daerah selama 3 tahun terakhir.

Berikutnya, tata kelola penyelenggaraan Pemda yang belum optimal. Reformasi birokrasi

daerah berjalan lambat.

"Akan sangat sulit mencapai tujuan bernegara jika kapasitas daerah rendah. Sementara, *re-sources* sudah didelegasikan kepada daerah," jelasnya.

Kondisi seperti ini, papar Ani, membuat ketimpangan antar daerah makin melebar. Dicontohkannya, masalah akses air minum. Ada daerah yang sudah bisa memberikan akses air minum layak minum 100 persen untuk seluruh penduduknya pada 2019. Di antaranya, Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kabupaten Klaten.

"Namun, ada beberapa daerah lain, misalnya Kabupaten Lanny Jaya, hanya 1 persen penduduknya yang mendapatkan akses air minum layak," ungkapnya.

Menurutnya, ketimpangan juga terjadi pada beberapa indikator kesejahteraan lainnya. Seperti angka partisipasi sekolah menengah atas, imunisasi leng-

kap, indeks pembangunan manusia, dan penduduk miskin.

Untuk indikator kemiskinan, Ani mengungkapkan, Kota Tangerang Selatan sebagai daerah yang paling sedikit memiliki orang miskin. Yakni, hanya 1,68 persen penduduk miskin. Kemudian disusul Kabupaten Badung, hanya memiliki 1,78 persen, dan Depok 2,07 persen.

Untuk capaian terendah alias paling banyak penduduk miskinnya adalah Kabupaten Deiyaki, yakni memiliki 41,76 persen penduduk miskin.

"Semua daerah mendapatkan dana transfer daerah. Bahkan, ada daerah mendapatkan dana otonomi khusus untuk pembangunan infrastruktur. Tapi, hasil pembangunan berbeda," ujarnya.

Dia menuturkan, dana dialokasikan ke daerah cukup besar. Hampir sepertiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dide-

legasikan langsung ke daerah. Pemerintah mengalokasikan Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2021 mencapai Rp 795 triliun, dari total belanja negara Rp 2.750 triliun.

"Ini angka yang sangat besar dan seharusnya mampu mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan daerah," tegasnya.

Ani menekankan perlunya kebijakan baru di daerah agar dalam pengelolaan anggaran bertumpu pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalum mengamini masalah integritas sebagai hambatan pembangunan di daerah.

"Peningkatan anggaran sudah dilakukan sejak 2010. Sayangnya memang korupsi kepala daerah menggerogoti itu semua," katanya. ■ KPJ